

PROFIL LEGISLATIF PEREMPUAN PERIODE 2004 - 2009 DI DPRD PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh : Puji Astuti



Abstract : Woman in legislative still be debated until now, connecting both with quantity or quality. There still much negative perception which was not favourable for woman to get involve actively as a member of legislature. On reality, the amount of woman in Indonesia more than half of our population, so it was realistic if woman get more active in political process. The more woman in legislative would be increasing state policy with more gender sensitivity. But in facts woman faced a great challenges for woman to be winner in legislative election because of politics, economics or social constraints. Thus research also hed proved that although woman have capacity, the path to get political office on legislative still be hard struggle, mainly because of high political cost should be paid.

Keywords : Legislature, Legislative Election, Gender Sensitivity

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik sudah lama menjadi wacana. Isu keterwakilan perempuan bahkan menjadi isu yang sangat fenomenal pada pemilu 2004, ketika secara konstitusional UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan himbauan agar dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD yang diajukan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Quota 30 % diharapkan menjadi upaya konstruktif yang mengandung rekayasa untuk mematahkan tradisi patriarki yang lebih memberikan kesempatan kepada laki-laki daripada perempuan, termasuk dalam memberikan peluang memperoleh jabatan-jabatan politik. Tradisi dan sistem patriarki telah lama dinilai sebagai sstem yang menghambat perempuan dalam memasuki ranah politik. Kondisi ini yang menyebabkan tidak mudah bagi perempuan untuk memperoleh tempat di dunia politik. Hal ini juga diungkapkan oleh Trafton yang menyatakakan bahwa "*The effort to take our place in the political system will not be an easy one*" (Trafton, 1987:7).

Perempuan menghadapi tantangan besar dalam meraih jabatan politik bukan hanya karena kendala yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada kendala struktural yang diciptakan oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan negara yang tidak memperhatikan kesetaraan gender. Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan di dunia dibangun atas dasar pandangan biner laki-laki dan perempuan (Nunuk, 2004:221). Dalam pandangan tersebut seringkali kaum laki-laki memandang kaum perempuan sebagai mahluk kelas kedua (*the second sex*) yang harus menurut segala kehendaknya. Pandangan ini dilandasi oleh konsep nature yang menyatakan bahwa secara alamiah terdapat

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Laki-laki dinyatakan mempunyai fisik yang lebih kuat daripada perempuan dan memiliki ketajaman pikiran (rasional) yang lebih baik dibandingkan perempuan. Konsep ini juga menempatkan suatu pandangan bahwa faktor budaya menyebabkan adanya pembagian tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan (division of labour) dimana budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi. Budaya yang terinstitusionalisasikan inilah yang membentuk apa yang disebut dengan budaya "patriarki" (Sumiarni, 2004:11).

Di Indonesia sendiri yang memang berideologi patriarki, doktrin yang membuat perempuan sulit keluar dari peran domestiknya dan sistem gender yang patriarki bisa jadi merupakan rintangan terbesar bagi perempuan untuk memasuki ranah politik. Meskipun realitasnya jumlah perempuan lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki, namun cakupan peran politik yang bisa dimainkan perempuan masih sangat terbatas. Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan politik pada dasarnya tidak hanya menyangkut upaya mematahkan tradisi patriarki, akan tetapi juga bagaimana membangun kesadaran pada kaum perempuan itu sendiri untuk memiliki kemauan dan kehendak melakukan pelibatan di arena politik. Penting untuk diartikulasikan keberanian kaum perempuan mengambil prakarsa yang menyangkut persoalan kaum perempuan.

Prakarsa politik perempuan sangat strategis menjangkau pembalikan kekuasaan yang didominasi kaum laki-laki. Jumlah perempuan yang lebih banyak selayaknya menjadi diktum pembebasan melalui solidaritas perempuan yang mengedepankan kesetaraan. Cara pandang ini diharapkan akan mendorong keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam area publik, terutama di dunia politik. Masuknya jumlah perempuan yang lebih banyak di dunia politik diharapkan akan menjadikan laki-laki lebih bijak sebagai mitra kerja dalam memutuskan kebijakan masyarakatnya yang lebih luas (<http://www.sinarharapan.co.id>)

Dalam konteks demokratisasi sendiri pelibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik merupakan sebuah keharusan karena isu strategis pembangunan saat ini memang menyangkut tiga hal yaitu peningkatan kualitas hidup, pelibatan peran serta masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Tanpa adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan termasuk kaum perempuan, maka sangat mustahil pencapaian optimal aspek kualitas hidup dan pelestarian lingkungan. Pelibatan perempuan penting karena dalam realitasnya jumlah perempuan di Indonesia memang lebih dari setengah jumlah penduduk dan perempuan juga lebih memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan. Oleh karena itu wajar apabila potensi perempuan ini diberdayakan agar bisa mengambil peran secara adil baik dalam dunia domestik maupun dunia publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mencoba mengkaji hal-hal yang mendasar terkait masuknya perempuan di dunia politik khususnya di legislatif antara lain (1). Bagaimana latar belakang anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah ? dan (2) Bagaimanakah orientasi peran anggota legislatif perempuan sebagai anggota badan perwakilan rakyat ? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah (1). Memperoleh

gambaran dan penjelasan tentang latar belakang dan pengalaman politik yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah, serta (2) untuk memperoleh gambaran tentang orientasi peran yang dimiliki anggota legislatif perempuan. Orientasi peran ini akan tercermin dalam sikap dan integritas mereka sebagai wakil rakyat dalam memutuskan kebijakan-kebijakan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mencoba memperoleh gambaran tentang latar belakang anggota legislatif perempuan dan orientasi peran mereka sebagai anggota badan perwakilan rakyat. Adapun unit analisisnya adalah anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan anggota legislatif perempuan guna memperoleh gambaran obyektif tentang latar belakang dan berbagai aktivitas politik yang dilakukan sebagai wujud pemahaman dan orientasi terhadap peranannya sebagai anggota badan perwakilan rakyat. Analisa data dilakukan dengan mereduksi berbagai pernyataan anggota legislatif tersebut sekaligus melakukan interpretasi terhadap kecenderungan-kecenderungan atas pendapat yang dikemukakan oleh obyek penelitian.

Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Anggota Legislatif Perempuan

Melibatkan kaum perempuan (yang secara kualitas dan kuantitas dianggap masih rendah) dalam proses politik bukanlah perkara mudah, karena dituntut upaya yang sungguh-sungguh untuk secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan mereka. Kesungguhan menjadi kunci penting karena dalam realitasnya rendahnya kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, khususnya bidang politik karena adanya hambatan-hambatan yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Idiom-idiom keperempuanan secara baku dibangun yang memperkuat anggapan bahwa tempat perempuan bukanlah di ranah publik, melainkan di ranah domestik. Anggapan yang kurang menguntungkan dan cenderung merugikan kaum perempuan ini secara bertahap harus diubah melalui upaya konstruktif secara sosial. Himbauan quota 30 % keterwakilan politik perempuan di legislatif sesungguhnya juga merupakan upaya konstruktif untuk melakukan perubahan tersebut. Namun karena masih sebatas himbauan dan bukan sebuah keharusan, maka himbauan tersebut belum cukup berhasil untuk mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan di legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Keanggotaan perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun juga tidak mengalami perubahan yang mencolok, terutama dari sisi kuantitas. Meskipun telah ada kebijakan quota 30 % akan tetapi jumlah anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2004 hanya 15 orang dari 100 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun ke 15 anggota legislatif tersebut masing masing berasal dari PDIP tiga orang (dari 31 orang wakil), Golkar empat orang (dari 17 orang wakil), PKB tiga orang (dari 15 orang wakil), PPP satu orang (dari 10 orang wakil), PAN satu orang (dari 10 orang wakil), Demokrat dua orang (dari 10 orang wakil) dan PKS satu orang (dari 7

orang wakil).

Sebagai kelompok minoritas di DPRD, anggota legislatif perempuan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan bargaining dengan anggota legislatif laki-laki, terutama dalam memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan perempuan yang seringkali dianggap tidak penting oleh kaum laki-laki. Kemampuan tawar-menawar ini tentu sangat membutuhkan ketercukupan wawasan atas persoalan-persoalan riil yang dihadapi. Oleh karena itu latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan dan pengalaman politik menjadi modal yang sangat penting bagi anggota legislatif perempuan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Tengah cukup baik dimana dari 15 orang tersebut masing-masing berpendidikan SMU empat orang (26,7%), berpendidikan strata satu delapan orang (53,3%) dan tiga yang lainnya (20 %) berpendidikan strata dua. Dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan peran politiknya.

Disamping pendidikan, pengalaman baik pengalaman berorganisasi maupun pengalaman pekerjaan juga menjadi modal penting bagi anggota legislatif dalam memformulasikan, melakukan tawar-menawar ataupun untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 orang anggota legislatif perempuan (73,3 %) tersebut memiliki kualitas pengalaman organisasi yang cukup baik. Mereka pada umumnya menjadi aktivis organisasi sosial maupun organisasi politik, dengan mengambil peran sebagai pengurus. Pengalaman organisasi ini telah memberikan bekal kemampuan manajerial sekaligus kemampuan politik. Disamping pengalaman berorganisasi, sebagian besar anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah juga telah memiliki pengalaman pekerjaan. Sebelum menjadi anggota legislatif, 10 orang diantaranya (66,7%) telah memiliki pekerjaan di berbagai bidang, baik sebagai PNS (satu orang), ABRI (satu orang), guru swasta (dua orang) dosen PTS (satu orang), Pengacara (satu orang), kontraktor (satu orang) dan tiga lainnya adalah wiraswasta. Terkait dengan tugas mereka sebagai anggota legislatif, pengalaman pekerjaan ternyata memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendukung tugas-tugasnya.

Sebagai anggota legislatif mereka menyadari bahwa untuk bisa melakukan kinerjanya dengan baik sebagai wakil rakyat, kemampuan bukanlah satu-satunya penentu, karena ada banyak faktor lain yang berasal dari luar dirinya. Kesamaan misi dan visi yang dibangun baik bersama dengan partai maupun anggota legislatif lain juga tidak kalah pentingnya. Kinerja legislatif perempuan bukanlah semata-mata pekerjaan individual, melainkan pekerjaan kolektif. Kondisi inilah yang menjadi sulit bagi perempuan sebagai minoritas untuk mempertahankan eksistensinya di lembaga perwakilan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masuknya perempuan dalam ranah politik bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu kemampuan perempuan sebagai anggota legislatif dalam mempertahankan eksistensinya merupakan prestasi yang harus dihargai. Sedikit sekali perempuan yang sejak awal menentukan politik sebagai pilihan dirinya untuk berkiprah, sehingga masuknya perempuan ke arena politik lebih banyak sebagai keadaan yang tak terduga. Di DPRD Propinsi Jawa Tengah periode

2004-2009, mayoritas anggota legislatif perempuan (sembilan orang) baru memiliki pengalaman pertama sebagai anggota legislatif. Ke sembilan anggota legislatif perempuan tersebut juga menyatakan mereka tidak mengira akan terpilih menjadi anggota legislatif karena dalam pencalonannya mereka ditempatkan di daerah-daerah yang konstituen partainya sedikit. Hal ini juga dikemukakan oleh anggota legislatif dari PAN, ibu Sri Mulyani ketika wawancara dengan peneliti di ruangan Fraksi PAN tanggal 16 April 2007 yang menyatakan :

“ menjadi anggota legislatif sesungguhnya diluar perkiraan saya. Sejak dicalonkan saya sudah memiliki keraguan karena selama ini saya memang tidak memiliki pengalaman politik yang memadai. Saya adalah seorang yang berkecimpung di dunia kontraktor. Tetapi saya hanya Bismillah saja dan tidak banyak berharap. Namun kenyataan saya memperoleh suara yang memenuhi syarat untuk menjadi wakil rakyat. Bagi saya ini campur tangan yang luar biasa dari Tuhan. Hal mendasar yang cukup menjadi dorongan bagi saya untuk maju adalah karena saya ingin tahu seperti apa sih yang dilakukan anggota dewan sehingga selama ini mereka banyak menerima sorotan dan kinerjanya dinilai rendah. Tapi ketika saya masuk dalam sistem ternyata memang tidak mudah untuk memasukan gagasan-gagasan kita, karena sebagai institusi pekerjaan di dewan ditentukan oleh tim bukan perorangan. Sebagai orang yang berada didalamnya kita hanya bisa sebatas memberikan masukan. Tapi kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap sebuah sistem, maka kita memang harus masuk didalamnya, meskipun kita tidak mampu melakukan perubahan secara besar. Dan dari pengalaman yang saya dapatkan menyadarkan saya bahwa saya mungkin akan lebih baik berada di luar institusi ini “

Apa yang dikemukakan ibu Sri Mulyani mungkin betul bahwa tidak mudah menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, karena harus memiliki kemampuan untuk menekan kata hati dan tidak bisa mengedepankan apa yang diyakininya benar. Oleh karena itu kemampuan anggota legislatif perempuan mempertahankan eksistensinya merupakan prestasi yang layak dihargai.. Dari ke 15 anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Tengah, enam diantaranya duduk di DPRD Jawa Tengah periode 2004-2009 bukan untuk yang pertama kalinya. Empat anggota legislatif dari Golkar, dua diantaranya telah memegang jabatan politik di dewan untuk ke tiga kali dan dua lainnya untuk yang ke empat kali. Sedangkan dua lainnya masing-masing satu dari PKB dan satu lainnya dari PDIP telah memegang jabatan politik di dewan untuk yang ke dua kali. Pengalaman politik secara langsung di dewan tersebut diharapkan akan makin meningkatkan ketrampilan politik anggota legislatif perempuan dalam melakukan bargaining, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan yang selama ini sering terpinggirkan.

2. Orientasi Peran Anggota Legislatif Perempuan

Dalam masyarakat yang patriarki, kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah lebih sedikit dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada kaum laki-laki, terlebih di area politik yang selama ini dinilai lebih pantas untuk kaum laki-laki. Oleh karena itu masuknya perempuan dalam area ini membutuhkan banyak persiapan, terutama keberanian. Hal ini juga dikemukakan oleh Cutler yang dikutip oleh Barbara Trafton *“If we are embarrassed to seek power, we can never expect to play a meaningful role in the political process”*

(Trafton, 1984:3). Tidak cukup bagi perempuan hanya memiliki kemampuan untuk masuk dalam dunia politik, akan tetapi juga keberanian. Pendapat Cutler tersebut juga dibenarkan oleh Nurchasanah anggota legislatif perempuan dari PPP dalam wawancara dengan penulis di ruang Komisi E pada tanggal 23 Maret 2007 juga menyatakan pendapatnya tentang masih rendahnya jumlah perempuan di lembaga legislatif.

" Saya yakin jumlah perempuan yang memiliki kualitas kemampuan untuk menjadi anggota legislatif banyak. Tapi mengapa mereka tidak mau terjun di dunia politik ? Masalahnya sangat terkait dengan keberanian. Sejak awal ketika perempuan mau masuk ke dunia politik sudah harus berhadapan dengan pandangan kaum laki-laki yang cenderung meragukan kemampuan dan kesungguhannya untuk mengembangkan karier di dunia politik. Kata-kata pedas, lontaran kritik yang cenderung bias gender akan menjadi sebuah kebiasaan yang harus diterima secara terbuka oleh kaum perempuan yang berkeinginan terjun di dunia politik, dan hanya sedikit perempuan yang mau menerima konsekuensi seperti itu. Tapi ada masalah lain yang acapkali membuat perempuan kurang berani mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik adalah peran ganda perempuan yang cukup menjadi kondisi dilematik, terlebih bagi perempuan yang sudah berkeluarga"

Besarnya tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik nyatanya bukanlah isapan jempol, tapi sebuah fakta yang harus dihadapi secara arif, terutama oleh kaum perempuan sendiri. Sebagai kelompok minoritas, dalam banyak hal perempuan harus bekerja keras, baik dalam memperjuangkan gagasan maupun dalam melakukan posisi tawar. Besarnya tantangan ini tentu saja tidak boleh menyurutkan keberanian kaum perempuan untuk tetap mau berkompetisi memenangi percaturan politik di legislatif. Hal ini penting karena keberadaan perempuan di legislatif memiliki arti yang strategis terutama untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan negara yang sensitif gender. Oleh karena itu anggota legislatif perempuan harus dapat membuktikan bahwa mereka juga bisa berprestasi sama seperti anggota legislatif laki-laki dengan memiliki integritas dan orientasi peran yang tinggi sehingga dapat mendukung kinerjanya. Pemahaman terhadap peran akan menumbuhkan tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan.

Dari hasil penelitian menunjukkan komitmen anggota legislatif perempuan terhadap tanggungjawab pekerjaan di DPRD Jawa Tengah cukup tinggi dimana dari 15 orang anggota legislatif perempuan tersebut 11 diantaranya (73,3 %) menyatakan selalu masuk kantor sesuai lima hari kerja yang ditetapkan. Sedangkan empat anggota lainnya (26,7%) menyatakan masuk ke kantor antara tiga sampai empat kali dalam satu minggu. Jam kerja yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan selaku wakil rakyat juga tinggi dimana dari 15 orang anggota dewan tersebut 12 orang (80 %) menyatakan menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai anggota dewan antara 50 - 69 jam/minggu sedangkan tiga lainnya (20 %) menyatakan lebih dari 70 jam dalam satu minggu.

Menjadi wakil rakyat tentu saja dituntut untuk memahami persoalan-persoalan riil pemerintahan (sebagai mitra kerja) dan kemasyarakatan (yang kepentingannya harus diperjuangkan). Oleh karena itu anggota dewan tidaklah hanya bekerja dibelakang meja. Tinjauan ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan konstituen untuk menyerap aspirasi adalah sebuah keharusan. Intensitas

keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam melakukan kunjungan lapangan cukup tinggi karena dari 15 orang anggota legislatif tersebut 10 orang diantaranya (66,7 %) menyatakan melakukan kunjungan lapangan antara enam sampai sepuluh kali dalam satu bulan, sedangkan lima lainnya (37,3 %) menyatakan melakukan kunjungan lapangan sebanyak satu sampai lima kali dalam satu bulan. Kunjungan lapangan bagi legislatif sangat penting guna mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya. Disamping kunjungan lapangan, sebagai wakil rakyat mereka juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, terlebih masalah yang berhubungan dengan perempuan. Isu-isu strategis perempuan sudah selayaknya menjadi perhatian khusus anggota legislatif perempuan.

Isu-isu perempuan sendiri sangat kompleks baik yang terkait dengan kepentingan praktis perempuan (domestik) maupun kepentingan strategis perempuan (publik). Basu (1995:11) mengemukakan adanya sejumlah isu yang selama ini menjadi inti perjuangan gerakan perempuan di berbagai belahan dunia antara lain hak-hak politik dan hukum bagi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, hak-hak reproduksi dan aborsi, kebebasan seksual, kesempatan kerja dan dirkriminasi kerja, serta partisipasi politik dan representasi politik perempuan. Gerakan perempuan di dunia umumnya dan Indonesia khususnya telah lama memperjuangkan isu-isu tersebut, yang berakar pada ketidakadilan gender baik di wilayah privat maupun publik. Terkait dengan wilayah privat misalnya gerakan perempuan telah lama meminta jaminan negara untuk penghapusan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan isu wilayah publik yang menyita perhatian gerakan perempuan adalah tuntutan kesetaraan hak-hak politik perempuan dan penghapusan diskriminasi di bidang pekerjaan.

Isu tentang keterwakilan politik perempuan dan kekerasan terhadap perempuan juga menjadi fokus perhatian anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Tengah. Salah satu bukti nyata perhatian tersebut adalah upaya mereka merealisasikan dibangunnya shelter bagi perempuan korban kekerasan dan juga pembentukan forum parlemen perempuan sebagai ajang untuk memberikan sosialisasi dan memotivasi kaum perempuan agar memiliki kesadaran dan kemauan terjun di dunia politik. Eksistensi kepentingan strategis perempuan itu sendiri sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang dibangun antara masyarakat dan kekuasaannya. Aspek kepentingan strategis perempuan ini merupakan nilai yang diperjuangkan oleh kaum feminis, suatu kelompok perempuan yang mencoba mengembangkan nilai-nilai feminisme yaitu cara berpikir yang diciptakan untuk dan atas nama perempuan yang melakukan kerja aktif untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat (Delmar;1987:13).

Dalam jangka panjang feminisme mengharapkan terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis, dimana dominasi dan penindasan laki-laki atas perempuan tidak ada lagi. Dalam kenyataannya apa yang diperjuangkan kaum feminis ini tidak mudah direalisasikan. Kesetaraan gender (*Gender equality*) menjadi hal yang sangat langka, bahkan di lembaga legislatif sekalipun perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dapat dijumpai, termasuk di DPRD Propinsi Jawa Tengah. Menurut Sri Mulyani dari PAN

(wawancara tanggal 16 April 2007), tidak diberikanya kesempatan kepada anggota legislatif perempuan pada komisi D (Komisi yang menangani pembangunan) merupakan indikasi perlakuan yang diskriminatif. Tidak masuk akal untuk tidak menempatkan perempuan di komisi tersebut hanya dengan alasan intensitas dan beban kerja yang ada di komisi tersebut dapat mengganggu kemampuan peran ganda mereka. Anggota legislatif perempuan lebih banyak dimasukan di komisis E (Kesejahteraan Masyarakat), yang beban pekerjaanya dinilai relevan dengan kodrat perempuan. Hal ini tentu tidak adil karena ketika mereka sudah duduk sebagai bagian dari institusi, maka soal kapasitas sebaiknya tidak lagi dikaitkan dengan perbedaan yang bersifat biologis. Tetapi demikianlah fakta yang terjadi, bahwa bias gender yang diskriminatif ternyata juga berlangsung di lembaga yang seharusnya melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kesetaraan gender. Meskipun ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, namun komitmen legislatif perempuan terhadap pekerjaan dan kedudukanya sebagai anggota legislatif tetap tinggi

Dalam konteks representasi, orientasi peran yang baik tidak secara otomatis membuat anggota legislatif perempuan konsern terhadap aspek keterwakilan pemilih (voters), terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik.. Dalam proses ini banyak kepentingan bertemu baik kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan partai politik maupun kepentingan dewan sebagai sebuah institusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anggota legislatif perempuan juga sering menghadapi dilema didalam pengambilan keputusan. Sebagai wakil rakyat mereka sadar bahwa keberadaan mereka adalah karena dipilih oleh rakyat dan selayaknya menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun demikian di sisi yang lain mereka sadar bahwa partai politik mempunyai andil yang cukup besar karena melalui partai inilah pintu pertama terbuka bagi pencalonan mereka. Ketika garis perjuangan partai dirasakan akan menyakiti atau merugikan rakyat, ternyata mereka belum memiliki cukup keberanian untuk mengambil sikap berbeda dengan kehendak partai, meskipun hal ini bertentangan dengan hati nurani. Dari 15 orang anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Jawa Tengah, maka sembilan orang (60%) diantaranya menyatakan bahwa dalam pengambilan sikap dan keputusan terkait dengan kebijakan yang diambil dalam proses politik di legislatif, mereka lebih mengikuti kepentingan politik partai. Orientasi keterwakilan dalam proses politik yang lebih memandang posisi dan kedudukan mereka sebagai wakil partai secara sadar diakui oleh sebagian besar anggota legislatif sebagai kondisi yang dilematis. Meskipun atribut mereka adalah wakil rakyat dan mereka dipilih oleh rakyat, akan tetapi mereka juga tidak dapat menghindari kenyataan bahwa mereka menjadi wakil rakyat karena dicalonkan oleh partai. Terlebih dalam sistem pemilihan kita, posisi tawar partai sangat tinggi karena partailah yang menjadi pintu utama untuk menentukan lolos tidaknya seseorang untuk menjadi calon. Kondisi inilah yang menyebabkan kualitas keterwakilan legislatif rendah karena anggota legislatif belum mampu menempatkan kepentingan pemilih atau kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam pembuatan kebijakan publik.

Rendahnya kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan di legislatif bersumber pada kuatnya hambatan yang menghalangi kaum perempuan untuk terjun di dunia politik. Jumlah perempuan yang secara sadar ingin melibatkan diri dalam dunia politik tidaklah banyak. Perempuan pada umumnya kurang percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki dalam memperebutkan jabatan politik. Belum lagi kendala politis dimana partai politik pada umumnya memberikan peluang yang cukup terbatas bagi perempuan untuk memperoleh jabatan politik. Sedangkan hambatan lain adalah adanya nilai-nilai budaya yang secara sengaja dikonstruksikan untuk membatasi perempuan masuk di ranah publik, termasuk di dunia politik. Banyak idiom-idion secara sengaja ditanamkan dalam keluarga tentang peran yang seharusnya dijalankan dan menjadi porsi kaum perempuan seperti idiom bahwa tugas perempuan adalah *ubah-ubah* (mencuci baju), *isah-isah* (mencuci perkakas rumah tangga), *olah-olah* (memasak), *tebah-tebah* (membersihkan dan menata tempat tidur). Secara tidak langsung idiom-idiom ini menghalangi perempuan untuk keluar dari area domestiknya, terlebih untuk masuk dunia politik. Kalau boleh jujur, rendahnya keterwakilan politik kaum perempuan memang berakar pada nilai keluarga dimana sangat sedikit keluarga yang mengizinkan anak perempuannya terjun ke politik, termasuk dari tokoh politik itu sendiri.

Menurut Azza Karam (1999:35) ada sejumlah kendala yang menghalangi kaum perempuan terjun ke politik yaitu :

1. Kendala Politik yang didalamnya mencakup:
 - a. Kelaziman "model maskulin" mengenai kehidupan politik dan badan pemerintahan hasil pemilihan.
 - b. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik dan meratanya standar ganda.
 - c. Kurangnya hubungan dan kerjasama dengan organisasi publik lainnya seperti serikat buruh dan kelompok perempuan.
 - d. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang berkembang, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik pada khususnya.
 - e. Hakekat sistem pemilihan yang mungkin menjadi kurang menguntungkan bagi kandidat perempuan.
2. Kendala Sosio ekonomi yaitu :
 - a. Kemiskinan dan pengangguran dimana ada kesenjangan yang signifikan antara status perempuan dan laki-laki di seluruh bangsa. Berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan diskriminasi gender dalam penggajian, rekrutmen, promosi dan pemecatan maupun meningkatnya segregasi profesional dan feminisme kemiskinan
 - b. Lemahnya sumber keuangan yang memadai
 - c. Buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi
 - d. Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional
3. Kendala ideologis dan psikologis yang antara lain mencakup
 - a. Ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial

- yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri
 - c. Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan yang kotor
 - d. Lemahnya perhatian media massa terhadap potensi dan kontribusi perempuan.

Dari hasil wawancara, anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah secara umum mengakui adanya kendala politik yang kuat di tubuh partai politik. Partai politik misalnya menetapkan pencalonan anggota dewan diprioritaskan bagi pengurus, sementara eksistensi perempuan dalam kepengurusan partai sangat dibatasi. Walaupun ada perempuan yang kemampuannya sama untuk suatu jabatan politik, partai akan lebih mengutamakan laki-laki. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan yang ingin mengejar jabatan politik di legislatif. Belum lagi saat ini dikatakan sebagai era kapitalisme politik, dimana butuh dana yang besar untuk bisa meraih jabatan politik. Hambatan berupa lemahnya sumber keuangan bagi calon legislatif perempuan juga diakui sebagai kendala yang sangat menghambat bagi perempuan untuk memenangkan persaingan dalam meraih jabatan di legislatif. Untuk menghadapi kendala-kendala baik yang bersifat politis maupun ekonomis, maka menjadi sebuah tuntutan yang tak terhindarkan lagi bagi kaum perempuan untuk membangun solidaritas penggalangan dana bagi perempuan yang berpotensi menduduki jabatan politik. Solidaritas ini penting karena sedikit sekali perempuan yang cukup memiliki modal sendiri untuk terjun ke dunia politik.

Beban ganda juga menjadi faktor yang membuat perempuan ragu-ragu melangkah ke arena politik. Hal ini karena kebanyakan nilai yang dikembangkan di masyarakat mengharuskan perempuan tetap mampu melakukan peran domestiknya ketika ia masuk di area publik. Kondisi ini membuat tidak semua perempuan mampu melakukannya. Butuh perempuan yang kuat dan tangguh untuk berhasil melakukan peran ganda ini. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah berkeluarga, pengertian dan dukungan dari pasangan hidup menjadi faktor yang sangat penting. Bahkan Trafton (1984:16) berpendapat perlunya berbagai persiapan yang harus dilakukan perempuan sebelum membuat pilihan untuk terjun ke politik antara lain mencakup:

1. Fisik dan mental
2. Berbagi waktu dengan keluarga
3. Persetujuan dengan keluarga
4. Mampu mendukung keuangan secara pribadi
5. Mampu memahami persoalan di daerah pemilihan
6. Tahu persis tujuan ambil bagian untuk menjadi calon legislatif

Dari sisi kualitas, rendahnya keterwakilan politik perempuan di Legislatif ini tidak lepas dari sistem pemilihan yang ada. Dominasi partai politik dalam menentukan urutan nomor bagi calon telah menghasilkan orientasi anggota dewan lebih sering mengedepankan kepentingan partainya. James S. Lee juga menyatakan bahwa *"Legislators receive pressure from their own personal values and their role orientation. They receive pressure from several resources outside the*

legislature: the governor, constituents, interests groups, and political party. And they are influenced by sources within the legislature-committee chairpersons, legislative leaders and other respected members" (Harrigan,1984: 219-222). Namun dalam konteks perwakilan sudah selayaknya seorang anggota legislatif mengembangkan orientasi perannya adalah sebagai penerima mandat dari orang-orang yang memilihnya. Dalam prakteknya hal ini sulit dilakukan karena sistem Pemilu yang ada mengisyaratkan keberhasilan orang untuk duduk di parelemen tidak sepenuhnya atas dasar suara yang diperoleh, melainkan urutan nomor yang otoritasnya ditentukan oleh partai. Maka dapat dipahami apabila orientasi keterwakilan mereka lebih mengedepankan kepentingan partai, apalagi dari 15 anggota legislatif tersebut 13 diantaranya (86,7 %) masih ingin mencalonkan lagi sebagai anggota dewan. Selama sistem pencalonan yang ada masih memberikan otoritas mutlak kepada partai tentang pencalonan tersebut tanpa adanya mekanisme lain yang mengontrol otoritas partai, maka sulit kita memperoleh kualitas keterwakilan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Penutup

Simpulan:

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait eksistensi perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa tengah yaitu:

1. Meskipun sudah ada kebijakan quota 30 % keterwakilan perempuan, jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah hanyalah 15 orang. Ada beberapa sebab yang diasumsikan menghalangi perempuan bertarung memperoleh jabatan di legislatif, yaitu: (1) kendala politis berupa terbatasnya peluang yang diberikan partai politik; (2) masih rendahnya keberanian yang dimiliki kaum perempuan sendiri untuk terjun ke dunia politik dan (3) keterbatasan kemampuan perempuan memenuhi kebutuhan dana secara pribadi untuk kepentingan kampanye pemilihan karena besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh calon dalam pemilihan.
2. Dari sisi latar belakang pendidikan dan pengalaman politik, modal yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Propinsi Jawa Tengah cukup memadai untuk menjalankan perannya karena dari 15 anggota, 11 orang diantaranya (73,3 %) berpendidikan strata satu dan strata dua, serta sebagian besar dari mereka adalah aktivis organisasi baik organisasi social, profesi maupun organisasi politik.
3. Orientasi peran yang dimiliki anggota legislatif perempuan sangat baik yang ditunjukkan oleh tingginya komitmen mereka terhadap pekerjaan. Komitmen terhadap pekerjaan dapat dilihat dari tingginya frekuensi kehadiran di kantor, tingginya jumlah jam kerja yang dihabiskan serta tingginya frekuensi dalam melakukan kunjungan lapangan.
4. Kualitas Orientasi keterwakilan anggota legislatif perempuan masih rendah karena dalam proses pembuatan kebijakan publik kepentingan partai politik lebih mempengaruhi sikap dan keputusan politiknya daripada kepentingan rakyat atau pemilih.

Saran :

1. Perlunya dibangun solidaritas perempuan dalam penggalangan dana yang bisa membantu pendanaan bagi kandidat perempuan, karena persoalan dana ditengarai menjadi hambatan yang sangat besar bagi perempuan untuk ambil bagian dalam kompetisi politik.
2. Perlunya sistem Pemilu yang memungkinkan terwujudnya kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan di legislatif, dimana kuota 30 % bukan sekedar himbauan akan tetapi mekanisme yang harus dipenuhi oleh setiap partai peserta pemilu.

Daftar Pustaka

Daftar Rujukan

- Basu, Amrita (1995), *The Challenge of Local Feminism : Women's Movement in Global Perspective*, Boulder, Westview Press.
- Daulay, Harmona, (2007), *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan, USU Press.
- Delmar, Rosalind (1987), *What is Feminism ? Dalam Julia Mitchell dan Ann Oakley (ed): What is Feminism ?*, Oxford, Basil Blackwell Ltd.
- Harrigan, John (1984), *Politics and Policy in States and Communities*, Boston, Little, Brown and company
- Karran, Azza (1999), *Perempuan di Parlemen*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan
- Napitupulu, Paimin (2005), *Peran dan pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Bandung, Alumni.
- Nunuk, A. Pratiwi (2004), *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, Magelang, Yayasan Indonesiatara.
- Nurhayati, Elli (2000), *Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sanit, Arbi (1985), *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Sumiarni, Endang (2004), *Gender dan Feminisme*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company
- Trafton, M. Barbara (1984), *Women Winning: How to Run For Office*, NJ, The Harvard Common Press Jurnal Analisis Sosial, Vol 6, Februari, 2001